

199

Hongkong di Bawah Kedaulatan Republik Rakyat Cina

Endi RUKMO*

Akhirnya setelah melalui perundingan-perundingan yang cukup berat selama dua tahun atau lebih dari 20 babak perundingan, pada tanggal 26 September 1984, Pemerintah Inggris dan Pemerintah Republik Rakyat Cina (RRC) berhasil memaraf sebuah deklarasi bersama tentang masa depan Hongkong setelah habis masa sewanya pada tanggal 30 Juni 1997. Kemudian di Beijing tanggal 19 Desember 1984, PM Margaret Thatcher dan PM Zhao Ziyang menandatangani. Deklarasi bersama setebal 46 halaman itu pada pokoknya berisi pengaturan Hongkong setelah RRC mengambil kembali kedaulatannya pada tanggal 1 Juli 1997. Baik Pemerintah Inggris maupun Pemerintah RRC tampaknya merasa puas dengan isi deklarasi tersebut.

Tulisan ini tidak sepenuhnya membahas isi deklarasi itu, tetapi di sini dibahas lebih akan menitikberatkan kepada baik motivasi Inggris maupun RRC sampai keduanya bersedia mengadakan perundingan, dampak persetujuan itu terhadap penduduk Hongkong sendiri dan dampaknya terhadap masa depan Taiwan, serta implikasinya untuk kawasan Asia Tenggara.

KEPENTINGAN RRC ATAS HONGKONG

Sudah sejak awal tahun 1950-an, atau sejak Partai Komunis Cina (PKC) berhasil merebut kekuasaan di daratan Cina, negara itu telah menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani oleh Kaisar Cina pada tahun 1842 atas Hongkong, 1860 atas Kowloon dan 1898 atas New Territory itu tidak seimbang, dan ditandatangani di bawah tekanan dan paksaan Inggris yang menang dalam perang.¹ Oleh sebab itu meskipun sebenarnya yang akan

*Staf CSIS.

¹David Bonavia, *Hongkong 1997* (Hongkong: South China Morning Post, 1983), hal. 18.

habis masa sewanya pada tanggal 30 Juni 1997 itu hanya New Territory, Pemerintah Beijing menuntut Inggris untuk mengembalikan sekaligus ketiga wilayah itu.

Usaha Pemerintah Beijing menguasai kembali Hongkong sebenarnya sudah sejak awal tahun 1950-an juga. Tetapi mungkin ada beberapa pertimbangan yang mencegah RRC cepat-cepat menguasai kembali wilayah itu. Yang pertama adalah pertimbangan militer. Pada awal tahun 1950-an itu secara militer RRC tidak cukup kuat untuk menyeberangi Sungai Shun Chun (sebuah sungai yang membatasi wilayah Hongkong dari wilayah RRC). RRC harus menghadapi pasukan Inggris yang pada waktu itu masih memegang status negara penjajah yang cukup tangguh di wilayah Asia-Pasifik. Pertimbangan militer itu juga dipengaruhi oleh keterlibatannya dalam Perang Korea tahun 1951-1953 yang mengakibatkan RRC dimusuhi oleh hampir semua negara-negara Barat sehingga mereka itu mengenakan embargo ekonomi. Situasi itu mendorong RRC untuk menanggukuhkan usahanya menguasai kembali Hongkong, satu-satunya jalan ke luar untuk menjual barang-barangnya. Oleh karena itu mau tidak mau RRC harus mendekati Inggris sebagai penguasa Hongkong, yang kebetulan adalah negara Barat pertama yang mengakui RRC.

Pertimbangan ekonomi juga merupakan salah satu faktor penundaan usaha RRC untuk menguasai kembali Hongkong. Ditinjau dari segi ekonomi, Hongkong sangat penting artinya bagi pembangunan ekonomi RRC. Dengan fasilitas-fasilitas dan sarana-sarana yang lengkap, Hongkong dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan devisa RRC. Investasi RRC di Hongkong mencapai 10 sampai 12 kali lebih besar dari investasi RRC di tempat lain. Sejak Mao Zedong meninggal, investasi RRC di Hongkong menyebar di sektor-sektor real estate, industri, perdagangan, perbankan dan asuransi, dan sektor-sektor jasa lainnya. Sekarang ini RRC menguasai sekitar 30% dari seluruh aset Hongkong.²

Tetapi perkembangan sejak akhir tahun 1970-an tampaknya menurunkan arti penting Hongkong bagi RRC. Sejak kelompok moderat yang dipimpin oleh Deng Xiaoping berhasil menguasai pucuk pimpinan pemerintahan RRC, Beijing berulang kali menegaskan bahwa penyatuan kembali wilayah Hongkong, Taiwan dan Makao merupakan salah satu sasaran nasional utama di samping program modernisasi. Hal itu kemungkinan karena Pemerintah RRC telah berhasil memperbaiki hubungannya dengan negara-negara Barat sehingga hubungan dagang secara langsung dengan negara-negara yang pernah melakukan embargo ekonomi terhadapnya dapat dilaksanakan. Dengan kata

lain, tanpa Hongkong pun RRC sekarang ini dapat meningkatkan hubungan dagangnya dengan negara-negara Barat.

Dalam situasi hubungan baik dengan negara-negara Barat itu, secara militer RRC akan dengan mudah menguasai kembali Hongkong. Baik Inggris maupun Amerika Serikat sekarang ini dapat dipastikan tidak akan berusaha melindungi Hongkong, bila wilayah itu diserang oleh pasukan RRC. Baik Inggris maupun Amerika Serikat berkepentingan menjalin hubungan yang baik dengan RRC tidak saja untuk menghadapi Uni Soviet, tetapi juga untuk kepentingan ekonomi mereka. Dalam masa pelaksanaan program modernisasi sekarang ini RRC membutuhkan modal dan teknologi dari negara-negara maju khususnya Amerika Serikat, Jepang dan negara-negara Eropa Barat. Sementara itu Inggris untuk menghadapi RRC secara militer saat ini perlu suatu perhitungan yang masak sekali mengingat RRC berbeda dengan Argentina misalnya. Dengan jumlah pasukan yang lebih dari 4 juta orang jelas bukan suatu lawan yang ringan, terlebih-lebih juga jarak yang sangat jauh bila ditinjau dari pertimbangan logistik. Oleh karena itu Inggris lebih suka mencari penyelesaian dengan jalan damai.

Penegasan Pemerintah Beijing untuk menyatukan kembali Hongkong, Taiwan dan Makao pada dasarnya bertujuan meningkatkan citra kelompok Deng Xiaoping di mata rakyat RRC dan memperbaiki citra RRC di mata internasional, khususnya negara-negara blok Timur dan Dunia Ketiga. Meskipun citra kelompok Deng Xiaoping semakin meningkat di mata rakyat RRC, masih banyak lawan-lawan politik yang harus dihadapi baik di dalam tubuh partai maupun di dalam Tentara Pembebasan Rakyat (PLA). Lawan-lawan politik dari kelompok keras itu sejak lama menuntut agar pemerintah menyatukan kembali wilayah-wilayah yang masih dijajah negara asing, karena tidak sesuai dengan kebijakan anti-kolonialisme yang diperjuangkan. Hal itu rupanya sesuai dengan kecaman-kecaman yang selama 20 tahun ini datang dari Uni Soviet, yang mengatakan bahwa RRC mengizinkan wilayahnya dijajah. Hal itu bertentangan dengan perjuangan komunis. Kecaman ini mengakibatkan citra RRC turun di kalangan negara-negara blok komunis dan Dunia Ketiga.

Dalam usaha melaksanakan penyatuan kembali wilayah-wilayah itu, Pemerintah RRC pertama-tama mengadakan perubahan konstitusi yang baru diberlakukan tanggal 1 Januari 1980. Untuk itu Kongres Rakyat Nasional membentuk Komisi Pembaharuan Konstitusi yang dipimpin oleh seorang tokoh negarawan senior, Peng Zhen. Setelah komisi ini berhasil membuat rancangan konstitusi yang diperbaharui itu, sejak bulan Mei 1982 rancangan itu diumumkan dan disebarluaskan secara terbuka dengan tujuan untuk dibahas. Dalam rancangan konstitusi yang baru itu salah satu pasalnya (pasal 31)

khusus dibuat untuk pembentukan wilayah-wilayah administrasi khusus. Pasal ini terutama disiapkan untuk menyelesaikan masalah masa depan Hongkong, Taiwan dan Makao. Tetapi berdasarkan pasal ini juga terbuka kesempatan untuk membentuk wilayah-wilayah khusus, misalnya yang sudah terjadi adalah keputusan Pemerintah Beijing untuk memberi status kepada 14 kota di pantai Timur dari Dalian di Utara sampai Beihei di Selatan. Kota-kota ini akan memiliki hubungan yang lebih terbuka dengan perusahaan-perusahaan asing dan usaha-usaha patungan antara perusahaan-perusahaan setempat dengan investor asing.³ Bunyi pasal 31 itu adalah sebagai berikut:

"Negara mengizinkan, jika perlu, membentuk wilayah-wilayah administrasi khusus. Undang-Undang dan peraturan yang berlaku di daerah-daerah khusus itu akan ditentukan oleh hukum menurut kondisi-kondisi spesifik."⁴

Berdasarkan pasal 31 ini secara terbuka pada bulan Juli 1982 Peng Zhen menyatakan bahwa Pemerintah RRC akan mengambil alih kembali Hongkong, Taiwan dan Makao. Pasal ini sengaja dibuat agar rakyat yang tinggal di wilayah-wilayah Hongkong, Taiwan dan Makao tidak akan merasa dirugikan dan merupakan jaminan buat mereka bila nanti telah berada di dalam kedaulatan RRC. Harapan Pemerintah Beijing adalah bahwa berhasilnya dikuasai kembali wilayah Hongkong tanpa suatu gejolak atau dengan kata lain berhasil disatukan kembali secara damai, akan menjadi model penyatuan kembali untuk Taiwan dan Makao. Tawaran-tawaran untuk penyatuan seperti itu mulai sering dinyatakan oleh para pemimpin Beijing kepada Taiwan dan Makao.

KEPENTINGAN INGGRIS ATAS HONGKONG

Sejak Perang Dunia II, Hongkong telah menjadi salah satu pusat keuangan, perdagangan dan industri yang terpenting di Asia. Sebagai satu koloni, Hongkong wajib mendukung perekonomian Inggris. Antara tahun 1945 sampai 1972, surplus Hongkong telah memperkuat kedudukan pound-sterling sebagai mata uang internasional. Sebagai pusat permodalan Hongkong mendapat pengawasan langsung dari London. Pendapatan rata-rata setiap tahunnya yang masuk ke Inggris mencapai sekitar 200 sampai 300 juta.⁵ Pendapatan tersebut belum meliputi keuntungan para penanam modal Inggris di Hongkong.

Oleh karena itu keputusan Pemerintah Beijing untuk mengambil alih kembali Hongkong cukup meresahkan Inggris, terutama karena dalam masa sulit-

³Merdeka, 9 April 1984.

⁴*Far East and Australasia 1982-1983*, "The People's Republic of China," London: Europa Publications Ltd., hal. 368.

⁵Yuen-Fong Woon, *op. cit.*, hal. 48.

nya situasi perekonomian sekarang ini Inggris masih membutuhkan Hongkong. Di samping itu Inggris sebagai negara besar dan pernah menjadi superpower di masa lalu, tidak begitu saja menerima tuntutan RRC. Hal itu jelas sangat berkaitan erat dengan harga diri dan tanggung jawabnya terhadap penduduk setempat. Untuk mendapatkan kepastian dari Pemerintah RRC, Perdana Menteri Inggris, Margaret Thatcher, memutuskan untuk berkunjung ke Beijing bulan September 1982 dengan tujuan utama merundingkan masa depan Hongkong setelah habis masa sewanya 30 Juni 1997.

Usaha Inggris dalam menyelesaikan masalah Hongkong itu rupanya tidak sia-sia. Setelah dua tahun berunding, pada tanggal 26 September 1984 tercapai suatu kesepakatan bersama yang menelurkan persetujuan-persetujuan yang intinya adalah sebagai berikut: (1) sesuai dengan pasal 31 konstitusi baru RRC, Hongkong akan menjadi suatu wilayah administrasi khusus (Special Administrative Region - SAR) mulai tanggal 1 Juli 1997; (2) wilayah ini akan tetap mempunyai sistem sosial ekonomi dan kehidupan seperti sekarang selama 50 tahun setelah 1 Juli 1997; (3) Inggris tetap bertanggung jawab atas pemerintahan Hongkong sampai 30 Juni 1997; (4) posisi Hongkong sebagai pelabuhan bebas, wilayah pabean tersendiri dan pusat keuangan tetap dipertahankan bersama kebebasan di bidang keuangan; (5) Cina akan bertanggung jawab atas masalah pertahanan dan politik luar negeri Hongkong; (6) sistem hukum dan pengadilan Hongkong, termasuk hukum adatnya tidak akan berubah; (7) pemimpin Pemerintah Hongkong akan ditunjuk oleh Beijing berdasarkan pemilihan umum atau konsultasi yang diadakan di Hongkong. Para pejabat senior diusulkan oleh pemimpin pemerintahan itu dan ditunjuk oleh Pemerintah RRC; (8) SAR Hongkong akan disebut "Hongkong, Cina" dan akan mempunyai otonomi dalam bidang ekonomi, keuangan dan moneter. Tidak akan ada pengawasan devisa dan dollar Hongkong akan mengambang, tetapi gambar Ratu Inggris, Elizabeth II, harus hilang; (9) para investor akan bisa menambah modal dan menarik kembali modalnya dengan bebas di Hongkong; (10) Hongkong bebas menentukan kebijakan pelayaran atau mengadakan hubungan dengan negara lain. Hongkong juga bisa ikut dalam badan internasional seperti GATT; (11) suatu Dewan Penghubung Inggris-RRC akan dibentuk untuk mengawasi peralihan pemerintahan pada tahun 1997 dan akan bekerja terus sampai 1 Januari 2000; (12) Komite tanah bersama Inggris-RRC akan dibentuk untuk memonitor penjualan tanah yang merupakan sumber utama penerimaan Pemerintah Hongkong. Tanah baru yang tersedia untuk dijual dibatasi 50 hektar tiap tahun mulai berlakunya deklarasi bersama sampai 30 Juni 1997. Sedangkan sewa tanah yang habis masa sewanya sebelum 30 Juni 1997 akan diperpanjang 50 tahun lagi tanpa membayar tambahan sewa; (13) Hongkong diizinkan mengadakan perjanjian udara dengan negara lain sepanjang tidak menyangkut daratan RRC; (14) po-

lisi dan pegawai negeri Hongkong dibolehkan terus bekerja dan memegang jabatannya.⁶

Isi deklarasi itu tampak memberikan jaminan tidak saja Inggris, tetapi juga penduduk Hongkong dan Pemerintah RRC sendiri. Dengan adanya jaminan dari Pemerintah RRC, Inggris dapat melanjutkan investasinya di Hongkong sekurang-kurangnya 63 tahun lagi atau sampai tahun 2047. Masa 63 tahun bagi para investor merupakan masa yang cukup untuk mengeruk keuntungan-keuntungan. Bagi penduduk Hongkong sendiri, diparafnya deklarasi itu menghilangkan ketidakpastian akan masa depan mereka.

98% dari penduduk Hongkong adalah orang Cina yang dapat dipastikan tidak dapat meninggalkan wilayah itu karena mereka tidak mempunyai cukup uang. Jadi mau tidak mau mereka harus tetap menggantungkan hidup mereka di Hongkong. Yang menjadi masalah adalah bahwa sebagian besar dari 98% penduduk Hongkong itu merupakan orang-orang Cina Nasionalis dan keluarganya yang lari dari RRC tahun 1949. Bagaimana mereka ini diperlakukan nanti setelah Hongkong masuk ke dalam kedaulatan RRC?

Sementara itu bagi Pemerintah Cina, keberhasilan perundingan itu merupakan suatu *prestasi besar*. Mereka bangga bahwa persetujuan yang menciptakan *satu negara, dua sistem* (yaitu di bawah kedaulatan sistem komunis, sistem kapitalis masih diizinkan untuk hidup) itu dapat dijadikan model penyelesaian penyatuan kembali Cina Daratan-Taiwan, Korea Utara-Korea Selatan atau Jerman Barat-Jerman Timur. Khusus untuk kelompok Deng Xiaoping, keberhasilan itu tidak saja dapat memberikan jaminan kepada program modernisasi, tetapi juga meningkatkan popularitas mereka di kalangan para pemimpin RRC lainnya. Pemerintah RRC juga dapat menunjukkan kepada dunia, khususnya negara-negara komunis lainnya dan negara-negara Dunia Ketiga, bahwa RRC memang bersungguh-sungguh berusaha menyatukan kembali wilayah-wilayahnya yang masih dijajah. Dengan demikian citra RRC di kalangan negara-negara itu akan baik kembali.

DAMPAK UNTUK TAIWAN

Hasil perundingan Inggris-RRC mengenai masa depan Hongkong itu ditanggapi dingin oleh pemimpin Kuomintang di Taipei. Mereka yakin bahwa Taiwan akan menjadi target berikutnya seperti yang telah dikatakan oleh Peng Zhen tanggal 16 Juli 1982 di depan Kongres Rakyat Nasional bahwa "Hongkong, Taiwan dan Makao akan menjadi wilayah administrasi khusus (SAR) di bawah pimpinan Beijing." Keberhasilannya menangani Hongkong itu mem-

⁶ Derek Davis, "Initialled, Sealed and Delivered," *Far Eastern Economic Review*, 4 Oktober 1984, hal. 12-13, dan lihat juga Harian *Kompas*, 27 September 1984.

punya keuntungan moral yang sangat besar. Penggabungan kembali Hongkong ke dalam kedaulatan RRC, meskipun merupakan suatu kejadian yang unik, bisa menjadi preseden yang akan memberi dorongan yang lebih kuat untuk memperjuangkan kembalinya Taiwan. Hal ini diakui oleh seorang pemimpin senior Partai Kuomintang di Taipei. Dia menyatakan bahwa dengan berhasilnya RRC menguasai Hongkong tanpa mempergunakan kekerasan senjata, Taiwan akan lebih mendapat tekanan internasional untuk mengadakan perundingan dengan Beijing dengan memakai formula Hongkong. Meskipun demikian kebijakan pemerintah nasionalis adalah tetap tidak mau berkompromi dengan Beijing. Menurut pengalaman sejarah, kaum Nasionalis sudah dua kali mengadakan kolaborasi dengan pihak komunis, tetapi dua kali juga selalu menjadi pihak yang kalah. Oleh karena itu Taipei memutuskan untuk tidak berunding lagi dengan Beijing.⁷

Dengan meningkatnya hubungan antara RRC dan negara-negara Barat khususnya Amerika Serikat, dapat dipastikan tekanan internasional terhadap Taiwan untuk berunding dengan Beijing akan menjadi lebih kuat. Tetapi Taiwan berbeda dengan Hongkong atau Makao. Di samping letak geografis, Hongkong saat ini juga tidak mempunyai pertahanan yang memadai. Di lain pihak, Pemerintah Taiwan sampai saat ini terus-menerus memperkuat pertahanannya dalam menghadapi ancaman dari daratan dan tetap berambisi untuk kembali menguasai seluruh Cina. Sementara itu kesulitan lain juga akan dihadapi Beijing. Penduduk asli Taiwan semakin sadar bahwa mereka mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri. Sejak beberapa tahun belakangan ini, mereka mulai menyatakan sikap bahwa mereka lebih suka Taiwan menjadi negara yang merdeka lepas dari Cina.

Jadi dapat diperkirakan bahwa dalam menghadapi masalah Taiwan ini Pemerintah Beijing akan lebih hati-hati. *Pertama*, penyatuan kembali secara militer pasti akan dijawab oleh pihak kaum Nasionalis yang memang sudah siap untuk itu. *Kedua*, cara militer itu hanya akan mengorbankan usaha-usaha pembangunan yang sekarang ini sedang digalakkan. *Ketiga*, secara ekonomi, Taiwan kalah penting dari Hongkong. Jadi mungkin meskipun secara retorik usaha penyatuan Taiwan ini terus dilakukan, usaha yang sungguh-sungguh akan ditanggihkan. Terlebih-lebih bila mengingat ikatan Taiwan-Amerika Serikat. Meskipun Amerika Serikat sudah berjanji kepada Beijing tidak akan mensuplai senjata ofensif kepada pulau itu, Washington tetap menganggap Taiwan masih mempunyai arti strategis bagi kehadirannya di kawasan Pasifik Barat. Pernyataan-pernyataan mengenai penyatuan kembali Taiwan ini memang akan tetap ditegaskan oleh para pemimpin Beijing. Tetapi hal itu kiranya hanyalah untuk memegang prinsip, sehingga Pemerintah Beijing tidak akan kehilangan simpati dari rakyat.

⁷ *Jakarta Post*, 10 Oktober 1984, hal. 1.

IMPLIKASI UNTUK ASIA TENGGARA

Ditinjau dari segi ekonomi, dampak masa depan Hongkong untuk kawasan Asia Tenggara tampaknya tidak akan besar. Negara-negara Asia Tenggara khususnya negara-negara ASEAN, kecuali Indonesia, Singapura dan Brunei, telah menjalin hubungan diplomatik dengan RRC, sehingga beralihnya kedaulatan Hongkong setelah 30 Juni 1997 nanti tidak akan menjadi hambatan bagi mereka. Sementara itu Singapura, meskipun tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan RRC, negara ini telah lama menjalin hubungan dagang dengan RRC, sehingga dapat dipastikan Singapura juga tidak akan mengalami hambatan hubungan dengan Hongkong.

Dampak itu mungkin akan lebih dirasakan oleh Indonesia yang sama sekali belum menjalin hubungan formal tingkat mana pun dengan RRC. Hubungan dagang baik dengan Hongkong maupun RRC tampaknya tidak berarti bila dilihat dari hubungan dagang Indonesia secara keseluruhan (lihat tabel). Sampai tahun 1983 ekspor Indonesia masih di bawah 1% dari seluruh ekspor kita. Demikian pula impor kita dengan Hongkong masih kurang dari 0,60%. Walaupun digabungkan dengan RRC, nilai perdagangan Indonesia-Hongkong, RRC baru sekitar 1% saja (tahun 1983). Tetapi bila dibandingkan dengan nilai perdagangan antara Indonesia dan negara-negara Eropa Timur (termasuk Uni Soviet), nilai perdagangan itu masih lebih tinggi. Tahun 1980-1983 secara berturut-turut ekspor kita ke negara-negara Eropa Timur hanya: US\$121 juta, US\$114 juta, US\$61 juta, dan US\$113 juta. Sementara itu impor kita dari negara-negara itu pada periode yang sama adalah: US\$138 juta, US\$100 juta, US\$87 juta, dan US\$66 juta.⁸

HUBUNGAN DAGANG ANTARA INDONESIA DAN HONGKONG/RRC
1980-1983
(dalam jutaan US\$)

	Ekspor				Impor			
	1980	1981	1982	1983	1980	1981	1982	1983
Total	21.909	23.810	22.329	21.146	10.837	13.270	16.859	16.423
Hongkong	152	147	145	182	137	68	87	65
RRC	—	8	14	27	197	254	231	204

Sumber: IMF, *Direction of Trade Statistics*, Yearbook 1984, hal. 210.

Dalam situasi goncangnya harga minyak sekarang ini kita terus berusaha meningkatkan hubungan dagang dengan negara-negara lain tanpa melihat

latar belakang ideologi, khususnya dalam usaha meningkatkan ekspor non-migas kita. Hal itu terungkap dengan dikirimnya misi-misi perdagangan ke berbagai negara termasuk negara-negara Eropa Timur. Dalam konteks itu kita dapat juga berusaha mempertahankan dan meningkatkan hubungan dagang kita baik dengan Hongkong maupun dengan RRC, meskipun pertimbangan sekuriti perlu tetap menjadi pegangan.

Kalau deklarasi bersama antara Pemerintah Inggris dan Pemerintah Beijing itu akan sungguh-sungguh dilaksanakan, kiranya Hongkong tetap mempunyai peranan seperti sekarang sedikitnya dalam kurun waktu 13 + 50 tahun atau 63 tahun. Yang menjadi masalah adalah apakah RRC akan menepati janjinya. Menurut para pejabat dan ahli ekonomi Jepang, otonomi Hongkong setelah 30 Juni 1997 akan dilaksanakan.⁹ Pemerintah Jepang sendiri telah mendapat jaminan dari Pemerintah Beijing ketika Menlu Jepang Shintaro Abe berkunjung ke RRC bulan Mei 1984. Mereka ini yakin bahwa kemakmuran dan kemajuan Hongkong penting sekali bagi pelaksanaan modernisasi RRC.

Tetapi kalau kita melihat perkembangan di atas dari segi sekuriti, tampaknya kita harus tetap waspada. Bertitik tolak dari tujuan akhir modernisasi RRC, yaitu menuju *satu negara sosialis yang kuat dan modern*, strategi RRC dalam menyatukan kembali wilayah-wilayah yang selama ini diklaim sebagai wilayah kedaulatannya adalah untuk membebaskan rakyat RRC atau wilayah RRC yang masih dikuasai penjajah, kaum kapitalis atau kaum reaksioner lainnya (menurut terminologi komunis), sesuai dengan paham Marxis-Leninis yang dianutnya. Setelah modernisasi berhasil, bisa saja RRC yang menganggap dirinya sudah kuat dan besar itu harus berpengaruh di kawasan ini. Pengalaman sejarah menunjukkan bahwa RRC tidak segan-segan menggunakan cara militer untuk menguasai wilayah yang diklaimnya (seperti penyerbuan Angkatan Laut RRC ke Kepulauan Paracel tahun 1974). Perlu diingat bahwa RRC juga mengklaim Kepulauan Spratly yang secara geografis sebenarnya lebih dekat dengan Pilipina, Malaysia, Vietnam, Brunei dan Indonesia.¹⁰

Dengan keberhasilan RRC memodernisasi angkatan lautnya, kemungkinan besar negara itu akan juga berambisi menguasai Kepulauan Spratly. Alasan untuk ini cukup kuat. Di samping alasan historis, konvensi hukum laut yang baru-baru ini berhasil disepakati di PBB memperkuat klaim RRC itu. Kepulauan Spratly jaraknya kurang dari 200 mil dari Kepulauan Paracel. Cukup dengan pasal-pasal konvensi yang mengatur Zona Ekonomi Eksklusif 200 mil, RRC bisa memperkuat klaimnya itu. Bila demikian halnya ancaman nyata akan tetap ada di depan mata kita.

⁹ *Far Eastern Economic Review*, 2 Agustus 1984, hal. 19-20.

¹⁰ Lihat Endi Rukmo, "Rezim Baru dalam Hukum Laut dan Implikasinya terhadap Kekuatan Laut di Asia Tenggara." *Analisa*, 1981/8, hal. 732-742.